

▶ TEMPAT ISTIRAHAT DI TOL

Jasamarga Geser Jadwal Bangun Hotel

Bisnis, JAKARTA — PT Jasamarga Properti, anak usaha PT Jasa Marga Tbk., memprioritaskan pembangunan tempat istirahat dan pelayanan untuk mudik Lebaran dan menunda pembangunan tiga hotel di tiga ruas jalan tol Trans-Jawa.

Putri Z. Salsabila
redaksi@bisnis.com

▶ Perusahaan memprioritaskan penyelesaian TIP tahun ini.

GM Tempat Istirahat dan Pelayanan PT Jasamarga Properti Hubby Ramdani mengatakan bahwa rencana pembangunan tiga hotel di tempat istirahat dan pelayanan (TIP) jalan tol Batang—Semarang, Solo—Ngawi, dan Mojokerto—Surabaya belum dimulai. Perusahaan memprioritaskan penyelesaian TIP tahun ini.

“Belum pada tahun ini karena kami fokus menyelesaikan TIP kami yang ada di sepanjang Trans-Jawa. Kami fokus untuk persiapan arus mudik Lebaran

2019 terlebih dahulu,” ujarnya kepada *Bisnis*, Selasa (12/3).

Berdasarkan catatan *Bisnis*, pembangunan hotel bujet itu rencananya dilakukan di TIP dengan luasan sedikitnya 6 hektare. Biaya pembangunan hotel di ruas tol milik induk usahanya tersebut diperkirakan menghabiskan Rp30 miliar per unit.

Nantinya, hotel tersebut akan diguna-

kan bagi pengguna jalan tol yang ingin beristirahat dan akan dikenakan biaya sekitar Rp300.000 per 6 jam. Pembatasan per 6 jam dikarenakan hotel bujet diperuntukkan sebagai tempat istirahat sementara, bukan untuk menginap.

Walaupun lahan untuk pembangunan tiga hotel tersebut sudah dipersiapkan, pengembangan serta kajian finansial masih disesuaikan dengan peraturan menteri dan persetujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengusulkan agar PT Jasa Marga Tbk. membangun hotel di tempat istirahat di ruas-ruas tertentu di jalan tol Trans-Jawa agar bisa digunakan oleh pengguna jalan yang ingin beristirahat.

Perubahan target dan rencana pembangunan hotel bujet di tiga jalan tol itu mundur karena PT Jasamarga Properti masih fokus menyelesaikan 25 TIP tipe A di seluruh ruas tol yang dikelola Jasa Marga dan kelompok usahanya.

Selain hal itu, Hubby mengatakan bahwa

pembangunan tiga hotel tersebut akan berdampak pada pengurangan kapasitas parkir TIP yang akan segera digunakan pada kegiatan arus balik Lebaran 2019.

“Setelah *peak season* Lebaran ini akan kami finalisasi dan ajukan ke Kementerian PUPR, nanti untuk *scheduling*-nya akan kami sesuaikan dengan jadwal Lebaran tahun 2020 karena ketika konstruksi akan mengurangi kapasitas parkir TIP.”

INVESTASI

Sebelumnya, Direktur Keuangan dan Pengembangan Jasamarga Properti Dian Takdir Badriyah mengatakan bahwa perusahaan mengeluarkan investasi Rp1,10 triliun hingga Rp1,20 triliun untuk pembangunan TIP di beberapa ruas jalan tol dalam 3 tahun terakhir. Investasi tersebut digunakan untuk membiayai konstruksi TIP di seluruh Indonesia, mulai dari lintas Trans-Jawa dan di luar Jawa.

Dia menyebutkan bahwa investasi bisa meningkat karena ada permintaan dari penyewa baru di beberapa TIP.

Secara umum biaya konstruksi per

meter persegi mencapai Rp4 juta. TIP yang dibangun JMP, lanjut Dian, memiliki luas yang berbeda, tergantung pada tipe TIP. Pembangunan TIP dibagi menjadi tiga tipe berdasarkan luas area dan fasilitas pelayanan.

“Total ada 31 TIP yang kami bangun dalam 3 tahun. Investasinya Rp1,10 triliun—Rp1,20 triliun,” ujar Dian, beberapa waktu lalu.

Dia menuturkan secara umum titik impas dari investasi yang dikeluarkan dalam pengusahaan TIP mencapai 8 hingga 10 tahun. Dia menyebutkan jangka waktu pengembalian investasi yang panjang menjadi tantangan karena sebagian besar penyewa di TIP perseroan dari kalangan usaha kecil dan menengah (UKM).

Menurut Dian, kalangan UKM belum terbiasa melakukan kontrak jangka panjang. Rata-rata durasi kontrak sewa dengan UKM baru 1 tahun. Namun, dia optimistis pelaku usaha UKM di TIP perseroan bisa terus berkembang. Secara keseluruhan, alokasi untuk UKM di TIP milik Jasamarga Properti mencapai 70%. ■

▶ PENEMUAN SITUS PURBAKALA



Antara/Ari Bowo Supto

Petugas Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan melakukan eskavasi di situs purbakala yang ditemukan saat pembangunan proyek jalan tol Malang-Pandaan di kilometer 35, Sekaran,

Pakis, Malang, Jawa Timur, Selasa (12/3). Situs berupa struktur susunan batu bata tersebut diduga merupakan kompleks pemukiman elit di era Kerajaan Majapahit pada abad 10 Masehi.

▶ PENYEDIAAN AIR BERSIH

Proyek Direncanakan Tahan Bencana

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menerapkan perencanaan proyek sistem penyediaan air minum yang tahan bencana.

Hal itu diperlukan karena sistem penyediaan air minum (SPAM) merupakan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah rawan bencana maupun pascabencana.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan SPAM dengan memasukkan rencana manajemen dalam penanggulangan bencana.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengatakan bahwa bangunan SPAM yang belum memiliki perencanaan tahan bencana terutama pada jaringan perpipaan baik transmisi

maupun distribusi yang terdiri atas pipa dan kelengkapannya termasuk jembatan pipa sehingga akan disesuaikan.

“Ke depan, pemilihan bahan dan konstruksi jaringan perpipaan akan menyesuaikan dengan tingkat kerawanan bencana, baik bencana alam maupun nonalam,” tuturnya kepada *Bisnis*, Selasa (12/3).

Menurut Danis, untuk implementasinya perlu dibuatkan aturan teknis perancangan bangunan SPAM yang tahan bencana agar menjadi acuan bagi para pelaksana penyelenggaraan SPAM.

Selain itu, untuk mendukung penyelenggaraan SPAM di daerah rawan bencana maupun daerah pascabencana, diperlukan dukungan pendanaan dari pemerintah daerah setempat.

“Baik pemerintah pusat atau pemda berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai sehingga penanganan dan pembangunan kembali infrastruktur pascabencana dapat segera direalisasikan.”

Sebelumnya, Direktur Pengembangan SPAM Ditjen Cipta Karya Agus Ahyar mengatakan bahwa proses konstruksi penyelenggaraan SPAM belum mengantisipasi terjadinya bencana dan Indonesia belum memiliki manajemen penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan SPAM.

“Maka sudah seharusnya antisipasi penanganan bencana penyelenggaraan SPAM perlu dituangkan dalam jakstranas [kebijakan dan strategi nasional],” katanya. (*Krizia P. Kinanti*)

▶ SERTIFIKASI PEKERJA KONSTRUKSI

Bidik Target Ambisius, Stakeholders Dilibatkan

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan sertifikasi tenaga kerja konstruksi sebanyak 512.000 sepanjang 2019.

Para pemangku kepentingan di industri jasa konstruksi seperti kontraktor, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah juga dilibatkan untuk mencapai target tersebut.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa dari target 512.000 sertifikasi pekerja konstruksi, kementerian bakal menanggung pendanaan untuk sertifikasi 212.000 pekerja.

Sertifikasi dilakukan melalui program pelatihan dan sertifikasi reguler maupun jalur vokasional.

Sementara itu, sertifikasi 300.000 tenaga kerja merupakan kolaborasi Kementerian PUPR,

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional, pemerintah daerah, dan para kontraktor.

“Kalau hanya dari APBN, itu hanya 212.000 [tenaga kerja], tetapi kami juga sharing dengan pemda dan penyedia jasa. Misalnya, di Aceh, kami sertifikasi 1.000 orang bekerja sama dengan pemerintah kota,” tuturnya, Selasa (12/3).

Menurut Basuki, target sertifikasi tahun ini terbilang ambisius karena hampir dua kali lipat dibandingkan dengan realisasi program serupa dalam kurun waktu 2015—2018 sebanyak 192.000 tenaga kerja.

Dengan kata lain, secara merata, dalam 4 tahun realisasi sertifikasi pekerja konstruksi mencapai 49.000 tenaga kerja.

Basuki menyebutkan bahwa target sertifikasi tahun ini me-

mang dikerek sejalan dengan permintaan Presiden Joko Widodo. Pada Oktober 2018, Presiden meminta agar sertifikasi digenot hingga sepuluh kali lipat.

Sertifikasi tenaga kerja konstruksi merupakan amanat dari Undang-Undang Jasa Konstruksi yang mengharuskan setiap pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh pekerja bersertifikat.

Hingga 2018, jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat mencapai 616.000 atau 7,40% dari populasi tenaga kerja konstruksi sebanyak 8,30 juta.

Basuki menuturkan dengan target sebesar ini, pihaknya optimistis bisa terus meningkatkan jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat. Tahun depan, dia berharap agar sertifikasi bisa mencapai 750.000 pekerja. (*Rivki Maulana*)

www.bca.co.id



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Direksi PT Bank Central Asia Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 April 2019
Tempat : Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski – Lantai 11 Jalan M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
Penjelasan: Pada saat penyampaian Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, akan disampaikan mengenai kinerja Perseroan dan pencapaian Perseroan serta hal-hal yang telah dilakukan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
Penjelasan: Penggunaan Laba Bersih Perseroan akan diusulkan untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen tunai, dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai laba ditahan.

3. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;
Penjelasan: Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan yang akan diusulkan adalah sebagai berikut:
i. memberhentikan dengan hormat Bapak Eugene Keith Galbraith selaku Wakil Presiden Direktur sejak ditutupnya Rapat;
ii. mengangkat Bapak Suwignyo Budiman sebagai Wakil Presiden Direktur yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut; dan
iii. mengganti Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang semula dijabat oleh Bapak Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan menjadi dijabat oleh Ibu Inawaty Handoyo yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Ibu Inawaty Handoyo sebagai Direktur Kepatuhan.

Adapun Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) anggota Direksi yang diusulkan untuk menduduki jabatan baru, dapat diunduh dari situs web Perseroan (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi>).

4. Penetapan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2019 serta tantiem untuk tahun buku 2018 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
Penjelasan: Dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui:
i. pemberian kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas dalam Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2019 serta tantiem untuk tahun buku 2018 kepada anggota Dewan Komisaris; dan
ii. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2019 serta tantiem untuk tahun buku 2018 kepada anggota Direksi.

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
Penjelasan: Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar di atas diusulkan untuk dikuasakan kepada Dewan Komisaris, agar Perseroan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pilihan akuntan publik yang terbaik dari sisi kualitas, syarat, dan harga yang kompetitif bagi Perseroan.

6. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/semantara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
Penjelasan: Pembayaran dividen interim/semantara akan dilakukan apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Persetujuan atas perubahan *Recovery Plan* Perseroan;
Penjelasan: Guna memenuhi ketentuan yang berlaku perlu dilakukan pengkinian atas Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.

8. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Central Asia Tahap I Tahun 2018;
Penjelasan: Direksi akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi tersebut di atas.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat Perseroan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan;

2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 pukul 16.15 WIB;

3. Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang bermaksud menghadiri Rapat Perseroan harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”);

4. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat Perseroan diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya;

5. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan:
a. Membawa surat kuasa yang sah dan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan atau sesuai dengan formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan. Formulir surat kuasa dapat diperoleh Pemegang Saham di:
i. Kantor Pusat Perseroan pada Divisi Sekretariat Perusahaan setiap hari kerja dan selama jam kerja Perseroan; atau
ii. Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Raya Saham Registra yang beralamat di Plaza Sentral Lantai 2 Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon +6221 2525666, Fax +6221 2525028 pada setiap hari kerja dan selama jam kerja Biro Administrasi Efek; atau
iii. Situs web Perseroan (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi>);
b. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pengumuman suara;
c. Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada huruf a butir 5 ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat;
d. Surat kuasa harus sudah diterima oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek yakni PT Raya Saham Registra paling lambat pada hari Senin, tanggal 8 April 2019, pukul 16.00 WIB;

6. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan pada Divisi Sekretariat Perusahaan, Menara BCA, Lantai 20, Jalan M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, setiap hari kerja dan selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai tanggal Rapat. Bahan-bahan Rapat tersebut juga dapat diperoleh Pemegang Saham Perseroan dengan cara mengunduh dari situs web Perseroan (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi>) atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh Pemegang Saham kepada dan diterima oleh Sekretaris Perusahaan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat;

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat selambat-lambatnya pada pukul 08.30 WIB.

Jakarta, 13 Maret 2019
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
Direksi